**THE PERCEPTION OF RIAU UNIVERSITY STUDENTS ON THE
IMPLEMENTATION OF COMMISSION SELECTION
ASSIGNMENTS IN SELECTING PRESIDENTS AND VICE
PRESIDENTS IN INDONESIA, 2019**

Amri Suryanto¹, Sri Erlinda², Jumili Arianto³

Email: amri.suryanto@gmail.com 1, linda_sri@yahoo.com 2, sunanariato18@gmail.com 3
No.Hp. 081277020148

*Pancasila and Civics Education Study Program
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *This research is motivated by a problem that arises when observations made by researchers, namely the demonstration of the University of Riau students on the implementation of the task of the general election commission. Students who are referred to as intellectuals who are considered critical of the political conditions in Indonesia, of course have a deep perception or view of the implementation of the tasks of the General Election Commission, given the General Election Commission as the organizer of the General Election of the President and Vice President and Board members simultaneously in 2019. . The formulation of the problem in this research is What is the University of Riau Student's Perception of the Implementation of the Election Commission's Duties in the Election of President and Vice President in Indonesia in 2019? The purpose of this research is to find out how the University of Riau Students' Perceptions of the Implementation of the Election Commission's Duties in the Election of President and Vice President in Indonesia in 2019. This research was conducted at the University of Riau in May to November 2019. This study used a descriptive method quantitative. The population in this study amounted to 31,478 who are active students of Riau University. The sample in this study was taken using a purposive sampling technique with a total of 100 people from all students. The results showed that the University of Riau Students' perception of the implementation of the general election commission tasks in the election of President and Vice President in Indonesia in 2019 was in the category of "Good".*

Key Words: *The Task of the General Election Commission.*

PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA TAHUN 2019

Amri Suryanto¹, Sri Erlinda², Jumili Arianto³

Email: amri.suryanto@gmail.com 1, linda_sri@yahoo.com 2, sunanarianto18@gmail.com 3
Nomor HP. 081277020148

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang muncul saat pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu adanya demonstrasi Mahasiswa Universitas Riau terhadap pelaksanaan tugas komisi pemilihan umum. Mahasiswa yang disebut sebagai kaum intelektual yang dianggap kritis terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia, tentunya memiliki persepsi atau pandangan yang mendalam terhadap pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum, mengingat Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan secara serentak pada tahun 2019 ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia tahun 2019? Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan di Universitas Riau Pada bulan Mei sampai November 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 31.478 yang merupakan Mahasiswa Universitas Riau aktif. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah ialah 100 orang dari keseluruhan Mahasiswa. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap pelaksanaan tugas komisi pemilihan umum pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Tahun 2019 berada dalam kategori “Baik”.

Kata Kunci: Tugas Komisi Pemilihan Umum.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu ialah sarana kedaulatan Rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri pada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai pemilihan umum sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6). Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum baik ditingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun bagian ketiga pada pasal 12 UU No 7 tahun 2017 telah menetapkan beberapa tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu saat ini diantaranya sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
2. Menyusun tata kerja kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten/kota, ppk, pps, kpps, ppln, dan kppsln;
3. Menyusun peraturan kpu untuk setiap tahapan pemilu;
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
5. Menerima daftar pemilih dari kpu provinsi;
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu;
8. Mengumumkan calon anggota dpr, calon anggota dpd, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu kepada masyarakat
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahasiswa dalam Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi. Mahasiswa merupakan sebuah status yang disandang seseorang ketika ia menjalani pendidikan formal pada sebuah perguruan tinggi, seseorang dapat dikatakan sebagai seorang mahasiswa apabila ia tercatat sebagai mahasiswa secara administrasi di sebuah perguruan tinggi yang tentunya mengikuti kegiatan belajar dan mengajar dari kegiatan lainnya.

Menurut Siswoyo dalam (Jeanete Ophilia dan Nekele Hulisen, 2016), Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individual yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan

tinggi baik swasta, negeri ataupun lembaga yang setingkat dengannya. Mahasiswa adalah generasi perubahan (*agen of change*), generasi pengontrol (*Social Control*) dan generasi penerus (*Iron Stock*). Generasi muda adalah posisi poros berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat dan negara. Maka tepat pula kiranya penulis menyajikan kaum terpelajar yang tentunya kaum muda yakni yang masih duduk di bangku perkuliahan di Universitas Riau.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan. Sedangkan Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai penerapan. Sedangkan Tugas adalah kewajiban yang dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan yang didalamnya terdapat tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan. Menurut Moekijat (1998: 10), suatu tugas merupakan kegiatan atau pekerjaan khusus untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka dapat ditarik sebuah simpulan bahwa Pelaksanaan Tugas adalah Tindakan dari sebuah rencana yang sudah dibebankan dan disusun secara matang serta terperinci demi mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan fenomena lapangan terdapat adanya informasi yang beredar luas terkait Komisi Pemilihan Umum di setiap provinsi/daerah seperti, kekurangan surat suara di setiap Tempat Pemungutan Suara, adanya aksi demonstrasi Mahasiswa terkait pelaksanaan dan tugas Komisi Pemilihan Umum serta adanya form A5 yang tidak berlakunya pada pemilih pindahan saat memilih. disamping itu Komisi Pemilihan Umum kali ini Mendapatkan Anggaran yang cukup besar yang berkemungkinan dapat maksimal tugas dalam pengerjaannya juga dilihat dari pengertiannya Pemilu adalah sebuah sarana penghimpun kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan asas secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan diatas maka di dapat rumusan masalah yaitu bagaimanakah Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia Tahun 2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Tempat Pada Penelitian ini dilakukan di Universitas Riau pada bulan Mei sampai dengan bulan November 2019. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Riau dengan jumlah populasi sebanyak 31.478 (Sumber: Humas Universitas Riau, 2018). Sampel penelitian ini diambil dengan teknik *purposive Sampling* dengan jumlah sebanyak 100 orang Mahasiswa Universitas Riau (Sugiyono, 2012). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara. Dalam menganalisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\% \quad (\text{Anas Sudijono, 2012})$$

Adapun Hasil analisa atau setiap opsi pada pertanyaan dikorvesikan menjasi tolak ukur daam pengambilan kesimpulan, untuk mengategorikan jawaban responden atas setiap item pertanyaan, maka digunakan kriteria interprestasi sebagai berikut :

- a. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 75.01% - 100% = Sangat Baik
 - b. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 50.01% - 75% = Baik
 - c. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 25.01% - 50% = Kurang Baik
 - d. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 00.00% - 25% = Tidak Baik
- (Suharsimi Arikunto, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum Adalah Penyelenggara Pemilu yang Memiliki Peran penting dalam mensukseskan Pemilihan Umum Pada Tanggal 17 April 2019 yang lalu. Komisi Pemilihan Umum Juga dituntut untuk selalu mematuhi tugas yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pada bagian ketiga pasal 12 yang sudah mengaturnya. Seiring berjalannya Proses Pemilihan Umum, Mahasiswa Berbondong-bondong mendatangi setiap Kantor Komisi Pemilihan Umum di setiap daerah, dalam hal ini Mahasiswa Universitas Riau Juga turut Ambil Peran akan hal tersebut. Dimulai akan tuntutan mereka terkait Tidak Berlakunya Form A5 milik mereka yang merupakan Solusi Ketika tidak dapat Pulang kampung untuk melakukan Pencoblosan serta adanya Indikasi Temuan-temuan yang dicurigai sehingga berdampak adanya Demonstrasi mahasiswa tersebut.

Menurut Siswoyo dalam (Jeanete Ophilia dan Nekele Hulisen, 2016), Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individual yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi baik swasta, negeri ataupun lembaga yang setingkat dengannya. Mahasiswa juga merupakan cendekiawan muda yang tidak pernah puas menerima kenyataan sebagaimana adanya. Mereka mempertanyakan kebenaran yang berlaku pada sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran yang lebih tinggi dan lebih luas. Peranan mahasiswa dewasa ini semakin meningkat dinegara-negara yang sedang berkembang mereka diharapkan pada membela dan keadilan serta perlawanan terhadap kezaliman dan kebathilan (Maryulis dalam Resin Awalita, 2015)

Berikut ini merupakan jawaban yang didapatkan dari angket tiap-tiap indikator pada penelitian ini, antara lain.

1. Merencanakan Program dan Anggaran Serta Menetapkan Jadwal

Berdasarkan jawaban yang didapat dari angket tentang Merencanakan Program dan Anggaran Serta Menetapkan Jadwal terdapat yakni sebesar (56.65%) responden menjawab “Setuju” yang terletak pada rentang 50,01% - 75%. Hal ini menunjukkan bahwa Merencanakan Program dan Anggaran Serta Menetapkan Jadwal oleh Komisi Pemilihan Umum Termasuk Pada katagori “Baik” dikarenakan dari keempat sub

indikator yang terdapat, rata-rata para responden menjawab Komisi Pemilihan Umum sudah Baik dalam Pelaksanaan Program dan Anggaran serta Menetapkan Jadwal.

2. Menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, DAN KPPSLN.

Berdasarkan jawaban yang didapat dari angket tentang Menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, DAN KPPSLN terdapat sebesar (49.87%) responden menjawab “Kurang Setuju” yang terletak pada rentang 25.01% - 50%. Hal ini menunjukkan bahwa Menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, DAN KPPSLN oleh Komisi Pemilihan Umum dikategorikan “Kurang Baik” dikarenakan dua dari delapan sub indikator yang terdapat para responden menjawab kurang setuju ha ini terbukti pada dua sub indikator yang menyatakan kurang baik dan pada hitungan rata-rata dari delapan sub indikator pada rentang 25.01% - 50%, mereka beranggapan dalam Menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, DAN KPPSLN masih kurang maksimal seperti masih adanya data yang tak sesuai antara KPU dengan KPU Kecamatan dan bagian yang mengurus Luar Negeri.

3. Menyusun Peraturan KPU Untuk Setiap Tahapan Pemilu.

Berdasarkan jawaban yang didapat dari angket tentang Menyusun Peraturan KPU Untuk Setiap Tahapan Pemilu terdapat sebesar (58%) responden menjawab “Setuju” yang terletak pada rentang 50.01% - 75%. Hal ini menunjukkan bahwa Menyusun Peraturan KPU Untuk Setiap Tahapan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum dikategorikan “Baik” dikarenakan pada sub indikator yang terdapat, rata-rata para responden menjawab Komisi Pemilihan Umum sudah baik Menyusun Peraturan Untuk Setiap Tahapan Pemilu walau ada yang harus di perhatikan kembali.

4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu

Berdasarkan jawaban yang didapat dari angket tentang Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu terdapat sebesar (47.25%) responden menjawab “Kurang Setuju” yang terletak pada rentang 25.01% - 50%. Hal ini menunjukkan bahwa Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum dikategorikan “Kurang Baik” dikarenakan dari keempat sub indikator yang terdapat, rata-rata para responden menjawab Komisi Pemilihan Umum Kurang dalam Pelaksanaan Pengendalian tahapan dan pemantauan semua tahapan pemilu dilihat dari kejadian – kejadian tersebar isu tercoblos kurang ditanggapi atau dipantau dengan baik.

5. Menerima Daftar Pemilih Dari KPU Provinsi.

Berdasarkan jawaban yang didapat dari angket tentang Menerima Daftar Pemilih Dari KPU Provinsi terdapat sebesar (54%) responden menjawab “Setuju” yang terletak pada rentang 50.01% - 75%. Hal ini menunjukkan bahwa Daftar Pemilih Dari KPU Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum dikategorikan “Baik” dikarenakan dari sub indikator yang terdapat, rata-rata para responden menjawab bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah Baik dalam dalam Menerima Daftar Pemilih dari Pelaksana walau ada yang harus di perhatikan kembali.

6. Memuktahirkan Data Pemilih Berdasarkan Data Pemilu Terakhir Dengan Memperhatikan Data Kependudukan Yang Disiapkan Dan Diserahkan Oleh Pemerintah Dan Menetapkannya Sebagai Daftar Pemilih.

Berdasarkan jawaban yang didapat dari angket tentang Memuktahirkan Data Pemilih Berdasarkan Data Pemilu Terakhir Dengan Memperhatikan Data Kependudukan Yang Disiapkan Dan Diserahkan Oleh Pemerintah Dan Menetapkannya Sebagai Daftar Pemilih terdapat sebesar (47%) responden menjawab “Kurang Setuju” yang terletak pada rentang 25.01% - 50%. Hal ini menunjukkan bahwa Memuktahirkan Data Pemilih Berdasarkan Data Pemilu Terakhir Dengan Memperhatikan Data Kependudukan Yang Disiapkan Dan Diserahkan Oleh Pemerintah Dan Menetapkannya Sebagai Daftar Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum dikategorikan “Kurang Baik” dikarenakan dari kedua sub indikator yang terdapat, rata-rata para responden menjawab bahwa Komisi Pemilihan Umum kurang baik dalam Memuktahirkan Data Pemilih Dengan Memperhatikan Data Kependudukan Yang Disiapkan Dan Diserahkan Oleh Pemerintah Dan Menetapkannya Sebagai Daftar Pemilih walau ada yang harus diperhatikan seperti data kependudukan yang ganda dan tidak ada klarifikasi resmi serta data orang meninggal masih bisa memilih.

7. Membuat Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Wajib Menyerahkannya Kepada Saksi Peserta Pemilu Penghitungan Suara

Berdasarkan jawaban yang didapat dari angket tentang Membuat Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Wajib Menyerahkannya Kepada Saksi Peserta Pemilu Penghitungan Suara terdapat sebesar (66.34%) responden menjawab “Setuju” yang terletak pada rentang 50.01% - 75%. Hal ini menunjukkan bahwa Membuat Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Wajib Menyerahkannya Kepada Saksi Peserta Pemilu Penghitungan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum dikategorikan “Baik” dikarenakan dari keempat sub indikator yang terdapat, rata-rata para responden menjawab Komisi Pemilihan Umum sudah Baik dalam Membuat Berita Acara dan Serifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Serta Wajib Menyerahkannya Kepada Saksi Peserta Pemilu Penghitungan Suara.

8. Mengumumkan Pasangan Calon Terpilih Serta Membuat Berita Acara.

Berdasarkan jawaban yang didapat dari angket tentang Mengumumkan Pasangan Calon Terpilih Serta Membuat Berita Acara terdapat sebesar (72.5%) responden menjawab “Setuju” yang terletak pada rentang 50.01% - 75%. Hal ini menunjukkan bahwa Mengumumkan Pasangan Calon Terpilih Serta Membuat Berita Acara oleh Komisi Pemilihan Umum dikategorikan “Baik” dikarenakan dari keempat sub indikator yang terdapat, rata-rata para responden menjawab Komisi Pemilihan Umum sudah Baik Mengumumkan Pasangan Calon Terpilih Serta Membuat Berita Acara.

9. Menindaklanjuti Dengan Segera Putusan Bawaslu Atas Temuan dan Laporan Adanya Dugaan Pelanggaran atau Sengketa.

Berdasarkan jawaban yang didapat dari angket tentang Menindaklanjuti Dengan Segera Putusan Bawaslu Atas Temuan dan Laporan Adanya Dugaan Pelanggaran atau Sengketa terdapat sebesar (49.50%) responden menjawab “Kurang Setuju” yang terletak pada rentang 25.01% - 50%. Hal ini menunjukkan bahwa Membuat Menindaklanjuti Dengan Segera Putusan Bawaslu Atas Temuan dan Laporan Adanya Dugaan Pelanggaran atau Sengketa oleh Komisi Pemilihan Umum dikategorikan “Kurang Baik” dikarenakan dari kedua sub indikator yang terdapat, rata-rata para responden menjawab Komisi Pemilihan Umum kurang baik dalam terus menindaklanjuti dengan segera laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu atas temuan hal ini masih harus diperhatikan seperti adanya surat suara yang kurang, pemilih yang tak terdata dan isu surat suara tercablos duluan.

10. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Dan/Atau Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Wewenang KPU Kepada Masyarakat.

Berdasarkan jawaban yang didapat dari angket tentang Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Dan/Atau Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Wewenang KPU Kepada Masyarakat terdapat sebesar (62%) responden menjawab “Setuju” yang terletak pada rentang 50.01% - 75%. Hal ini menunjukkan bahwa Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Dan/Atau Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Wewenang KPU Kepada Masyarakat oleh Komisi Pemilihan Umum dikategorikan “Baik” dikarenakan dari keempat sub indikator yang terdapat, rata-rata para responden menjawab Komisi Pemilihan Umum sudah Baik dalam Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu Dan/Atau Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Wewenang KPU Kepada Masyarakat.

11. Melakukan Evaluasi dan Membuat Laporan Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Berdasarkan jawaban yang didapat dari angket tentang Melakukan Evaluasi dan Membuat Laporan Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu terdapat sebesar (55.50%) responden menjawab “Setuju” yang terletak pada rentang 50.01% - 75%. Hal ini menunjukkan bahwa Melakukan Evaluasi dan Membuat Laporan Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum dikategorikan “Baik” dikarenakan dari keempat sub indikator yang terdapat, rata-rata para responden menjawab Komisi Pemilihan Umum sudah Baik dalam Melakukan Evaluasi dan Membuat Laporan Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

12. Melaksanakan Tugas Lain Dalam Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan jawaban yang didapat dari angket tentang Melaksanakan Tugas Lain Dalam Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terdapat sebesar (64%) responden menjawab “Setuju” yang terletak pada rentang 50.01% - 75%. Hal ini menunjukkan bahwa Melaksanakan Tugas Lain Dalam Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan oleh Komisi Pemilihan Umum dikategorikan “Baik” dikarenakan dari keempat sub indikator

yang terdapat, rata-rata para responden menjawab Komisi Pemilihan Umum sudah Baik dalam Melaksanakan Tugas Lain Dalam Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk Melihat Penjelasan Tentang Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum terhadap persepsi Mahasiswa dapat dilihat pada Tabel.1 Berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Presepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Tahun 2019.

Table	Alternatif Jawaban							
	Sering Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%
4.3	22	22	57	57	12	12	9	9
4.4	12	12	42	42	31	31	15	15
4.5	17	17	64	64	16	16	3	3
4.6	9	9	41	41	40	40	10	10
4.7	8	8	50	50	36	36	6	6
4.8	7	7	49	49	33	33	11	11
4.9	13	13	38	38	39	39	10	10
4.10	8	8	44	44	34	34	14	14
4.11	5	5	43	43	39	39	13	13
4.12	9	9	38	38	37	37	16	16
4.13	6	6	31	31	50	50	13	13
4.14	18	18	40	40	29	29	13	13
4.15	14	14	37	37	34	34	15	15
4.16	10	10	44	44	31	31	15	15
4.17	10	10	36	36	42	42	12	12
4.18	8	8	30	30	43	43	19	19
4.19	12	12	42	42	41	41	5	5
4.20	14	14	36	36	32	32	18	18
4.21	11	11	33	33	38	38	18	18
4.22	13	13	55	55	26	26	6	6
4.23	14	14	51	51	28	28	7	7
4.24	22	22	44	44	29	29	5	5
4.25	27	27	51	51	20	20	2	2
4.26	23	23	44	44	32	32	1	1
4.27	14	14	38	38	36	36	12	12
4.28	13	13	34	34	36	36	17	17
4.29	16	16	53	53	24	24	7	7
4.30	16	16	39	39	34	34	11	11
4.31	15	15	39	39	34	34	12	12
4.32	12	12	45	45	35	35	8	8
4.33	15	15	49	49	31	31	5	5
Jumlah	413	413	1.337	1.337	1.022	1.022	328	328
Rata-Rata	13.32	13.32	43.12	43.12	32.96	32.96	10.58	10.58

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Tahun 2019 Dengan rata-rata 13.32 responden dengan presentase 13.32% menjawab “Sangat Setuju”, dengan rata-rata 43.12 responden dengan presentase 43.12% menjawab “Setuju”, dengan rata-rata 32.96 responden dengan presentase 32.96% menjawab “Kurang Setuju”, dan dengan rata-rata 10.58 responden dengan presentase 10.58% menjawab “Tidak Setuju”.

Berdasarkan Tolak Ukur yang dipaparkan pada bab sebelumnya yaitu apabila:

1. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 75.01% - 100% = Sangat Baik
2. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 50.01% - 75% = Baik
3. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 25.01% - 50% = Kurang Baik
4. Apabila responden menjawab sangat baik + baik berada pada rentang 00.00% - 25% = Tidak Baik

(*Suharsimi Arikunto, 2010*)

Maka hasil yang didapatkan dalam rekapitulasi yang diatas yaitu 13.32% + 43.12% = 56.44%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Universitas Riau Terhadap Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Tahun 2019 berada pada tingkat “**Baik**”.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Tahun 2019 “Baik” Hal ini dikarnakan hasil dari perhitungan responden yang menjawab “ Sangat Setuju” berjumlah 13.32% ditambah dengan hasil perhitungan responden yang menjawab “Setuju” dengan Jumlah 43.12% yaitu hasil penjumlahannya 56.44%, dimana rentang ini berada pada kategori “Baik” dengan keberadaan pada rentang 50.01% - 75%. Dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa universitas riau terhadap pelaksanaan tugas komisi pemilihan umum pada pemilihan presiden dan wakil presiden di indonesia tahun 2019 berada pada tingkat “**Baik**”.

Rekomendasi

1. Kepada mahasiswa yang selalu disebut sebagai kaum intelektual yang nantinya akan menjadi penggerak bangsa untuk masa yang akan datang, untuk dapat selalu mendukung dan terus mengawasi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan

Komisi Pemilihan Umum dimana perbaikan demi perbaikan akan ditempuh dan yang akan dijalankan.

2. Kepada masyarakat untuk selalu mendukung apa yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum, dan untuk kedepan agar lebih teliti dan saling mengingatkan, sebab masyarakat meninjau ketika terjadi kesalahan yang akan merugikan kisa semua.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Prof. Dr. Mahdum, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Supentri, M.Pd Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Bapak Jumili Arianto, S.Pd., M.H selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Ibu Sri Erlinda, S.IP., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Jumili Arianto, S.Pd., M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan, arahan, kritik serta saran hingga penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak Dr. Hambali, M.Si Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, dan Bapak Drs. Zahirman, M.H selaku dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan dan masukan yang berguna bagi penulis.
6. Bapak Dr. Hambali, M.Si, Bapak Drs. H. Zahirman, M.H, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Ibu Sri Erlinda, S.IP., M.Si, Bapak Jumili Arianto, S.Pd., M.H, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Haryono, M.Pd , Separen, S.Pd., M.H, Bapak Indra Primahardani, MH., Bapak Mirza Hardian, M.Pd dan Ibu Hariyanti, M.Pd selaku dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
7. Kepada kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda Syahril Chaniago dan Ibunda Maidah, Adik-adikku Bayu Firmansyah, Putri Annisa, Zahira Shofa dan Siti Aisyah Ramadhani yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang, semangat dan selalu mendoakan penulis. Pengorbanan mereka begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada Rekan maupun sahabat baik selama mengarumi Nuansa Perguruan Tinggi ini ataupun Kelembagaan yang membantu memberikan motivasi dan semangat yang tak henti-hentinya kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Sudijono. 2012. *Pengantar Statistik Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.

Awalita, Resin.2015. *Analisis Persepsi Mahasiswa Prodi PPKn Tentang Peranan Media Mass dalam Pencitraan Politik Jokowi di Universitas Riau*. Pekanbaru.

Jeanete Ophilia P & Neleke Huliselan. 2016. Identifikasi Gaya Belajar Mahasiswa. *Jurnal Psikologi Undip*. Vol. 15, No.1.

Moekijat, 1998, Analisis Jabatan, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi KBBI, diakses 29 November 2019 dari <https://kbbi.web.id/Pelaksanaan-Tugas>.